

SETITIK NILA



sebutan "partisipasi masyarakat". Menyadari itu, amat banyak masyarakat yang lalu bersedia saja memberi uang kepada polisi (mulai dari denda "damai" lalu lintas hingga penanggungan perkara) yang sejak awal memang telah bersedia menukar kewenangannya.

Kembali dapat kita perhatikan bahwa, secara substansi, perbuatan Gayus sebenarnya tidak ada bedanya dengan kebanyakan anggota masyarakat lainnya. Makin tinggi pangkat, makin serius masalah atau makin luas kewenangan yang hendak dipertukarkan, maka makin besar pula uang yang bisa disediakan oleh anggota masyarakat.

Ketiga, walau telah melakukan diagnosis atas kelemahan diri sendiri, menurut saya, Polri tidak atau belum habis-habisan menjauhkan diri dan anggotanya dari kemungkinan godaan uang. Pada konteks penerimaan anggota misalnya, demikian pula pada fungsi lalu-lintas, penulis melihat kesungguhan itu ada. Berbagai cara diupayakan agar korupsi tidak terjadi. Pada keduanya telah tercipta sistem yang sedemikian rupa sehingga setiap personil terawasi dari sisi penerimaan dan penggunaan keuangan. Juga diciptakan sistem agar tidak ada satupun personil yang memiliki kewenangan sedemikian besar atau luas. Sayangnya, hal ini tidak terlihat

pada fungsi reserse.

Pada fungsi reserse ini, manajemen tradisional nampaknya secara sengaja dibiarkan terus berlangsung. Yang disebut manajemen tradisional dalam hal ini adalah hidupnya anggapan bahwa penanganan kasus itu sepenuhnya terkait kemauan serta kewenangan si penyidik. Bagaimana saya menjalankan, dan apa hasil akhirnya, itu juga terserah si penyidik. Dengan kata lain, personalitas penyidik masih amat besar sehingga tetap berpotensi menyimpangkan kontak yang selama itu sudah terjadi antara penyidik dengan tersangka (atau pengacaranya).

Penyakit yang satu ini diperparah dengan beberapa karakteristik khas kepolisian apabila terdapat anggotanya yang berperilaku menyimpang atau bahkan jahat. Apa itu?

Karakteristik pertama, bahwa berbeda dengan militer dimana ruang bagi penyimpangan pribadi amat terbatas, pada kepolisian tidaklah demikian. Seorang brigadir pun pada dasarnya mampu berbuat penyimpangan bernilai rupiah amat besar, dan sekaligus mengegerkan organisasinya. Hal itu memang sesuai dengan karakter kepolisian yang soliter, dimana setiap personil polisi adalah representasi hukum sekaligus organisasinya. Dengan kata lain, ketika masing-masing anggota Polri tetap

saja tidak mampu mengendalikan diri dalam hal uang, setiap kali pula Polri sebagai organisasi akan terdera hebat. Jadi, tidak perlu banyak, cukup nila setitik untuk menggoyang organisasi Polri.

Karakteristik kedua, bahwa berbeda dengan penyimpangan di militer dimana masih terdapat kesan menutupi (entah atas nama semangat korps atau yang lain), tidak demikian halnya dengan kepolisian. Walau mungkin tak kalah kotor, komunitas kepolisian cenderung tega "membuang" anggotanya yang menyimpang itu. Kalaupun ada hubungan tidak langsung dengan pejabat di atasnya, maka personil bawahannya lebih cenderung dikorbankan. Kilahnya adalah, "...satu anggota kotor tidak usah dipertahankan. Masih ada ratusan ribu anggota yang baik." Kecenderungan ini menjadikan kasus-kasus penyimpangan lebih mudah tercuat ke permukaan dan, selanjutnya, dipersepsikan sebagai tambah banyak dari waktu ke waktu.

Karakteristik ketiga, peran kepemimpinan (leadership) dari berbagai level seringkali bergerak antara "ada dan tiada" (atau elusiv). Sulit untuk mendefinisikan apa itu kepemimpinan yang baik dalam lingkup organisasi kepolisian. Apakah yang semata-mata berani, jujur dan akuntabel itu dianggap teladan? Ataukah yang baik itu adalah yang mengayomi anak buah, memberi kesejahteraan dan memperbaiki fasilitas (walaupun tidak jelas asal-usul dananya)?

Menyadari tiga masalah Polri terkait uang serta menyadari tiga karakter komunitas polisi jika ada yang ketahuan main uang, masak sih Polri masih tidak mau serius membenahi diri? Adakah menunggu cobaan lain yang lebih berat dari masalah Gayus? Wallahualam.

Adrianus Meliala
adrianus@ui.ac.id

MEMBANGUN POLRI DARI LUAR GLOBAL PLAYER?

OLEH DRs BOY SALAMUDDIN

Pada rencana strategis tahun 2010-2014 Polri menyatakan secara eksplisit membangun standar pelayanan prima. Prima dapat dimaknakan utama, tangguh, andalan, terbaik, terdepan, paling penting dan masih beberapa makna atau penafsiran lainnya. Kita asumsikan saja prima dalam konteks ini adalah utama dan terdepan. Dengan demikian rencana strategis Polri ini kita baca dan pahami bersama sebagai suatu upaya sistematis, terukur, berkesinambungan dan menyeluruh Polri dalam mengoptimalkan segenap sumber daya Polri guna mencapai kapasitas dan kapabilitas operasional Polri. Muara atau *outcome* dari strategi ini adalah terwujudnya keadilan dan kepastian hukum serta mantapnya kamdagri sebagai bagian integral pembangunan nasional guna terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

IDEALISME itu akan dibaca secara sederhana oleh sebagian dari kita sebagai cita-cita untuk mewujudkan visi Polri dalam konteks pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran Polri di wilayah hukum dalam negeri Indonesia. Namun perlu dipahami juga, bahwa Polri sebagai suatu lembaga pemerintah adalah subsistem dari sistem kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Polri perlu memahami secara cerdas dan cermat bahwa dalam konteks multi track diplomacy (diplomasi total dengan melibatkan segenap komponen pemerintah dan bangsa Indonesia) bahwa Polri adalah salah satu aktor penting atau elemen strategis dalam diplomasi politik dan kebijakan luar negeri Indonesia.

Sebagai pembandingan di era dulu kita mengenal *first track diplomacy* yang mana pemerintah memainkan dan menjalankan peran sentral dan utama dalam menjalankan kebijakan dan politik luar negeri Indonesia. Sejalan dengan perkembangan masyarakat sipil atau madani, maka peran publik dipandang signifikan





dan mampu bersinergi dengan pemerintah dalam diplomasi politik luar negeri. Hal ini yang dikenal sebagai second track diplomacy. Diplomasi publik antara lain dilakukan oleh kelompok pebisnis atau profesional, warga negara biasa, kalangan akademisi (peneliti, pendidik, dll), organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga sosial, keagamaan dan keuangan, termasuk juga di dalamnya media massa.

Kesemuanya ikut berperan dan berkontribusi bagi kepentingan politik luar negeri Indonesia. Masih segar dalam ingatan masyarakat dan bangsa Indonesia ketika salah seorang reporter TV One yang mengalami cedera akibat tembakan brutal serdadu dalam kasus serangan terhadap kapal Mavi Turki yang sedang didalam perjalanan kemanusiaan menuju Gaza. Apa yang terjadi dan reaksi yang kemudian muncul dari apa yang dialami rekan-rekan media massa tersebut, menunjukkan arti penting peran dan pengaruh media massa terhadap dinamika politik kawasan ataupun internasional.

Kebijakan dan politik luar negeri Indonesia seringkali dinyatakan sebagai politik luar negeri yang bebas dan aktif. Pemahaman sederhananya bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi berdaulat tidak ingin memosisikan diri sebagai bagian dari polarisasi blok politik ataupun aliansi kerja sama keamanan tertentu, sebagaimana

pernah terjadi di era perang dingin dulu. Indonesia ingin berperan secara aktif dalam membangun kerja sama regional maupun multilateral dalam mendorong terciptanya keamanan internasional dan perdamaian dunia. Menlu Marty Natalegawa menempatkan perspektif politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia dalam apa yang disebutnya dynamic equilibrium (keseimbangan dinamis), di mana tidak ada kekuatan dominan tunggal di kawasan dan berbagai negara berinteraksi secara damai dan menguntungkan.

Mengutip apa yang disampaikan Pattiradjawane bahwa "kita ingin memaknai dynamic equilibrium (Doktrin Natalegawa), sebagai bagian dan antisipasi dinamika perubahan global yang secara ekonomi mengalami resesi yang berkepanjangan, dan secara politik internasional mengubah keseluruhan tatanan dan persepsi global kita di kawasan Asia Timur dalam konteks geografis kekuatan-kekuatan ekonomi, perdagangan, politik, dan sosial budaya yang sama sekali berbeda dengan masa Perang Dingin" (Rene L Pattiradjawane, dimuat dalam rubrik internasional Kompas, Rabu, 5 Mei 2010).

Aktor Regional dan Internasional
Aktor dalam hubungan internasional adalah pelaku-pelaku utama di dalamnya. Mereka adalah orang-orang yang merumuskan kebijakan

dan politik luar negeri suatu negara, lembaga regional, inter regional dan lembaga-lembaga global. Termasuk juga di dalamnya adalah yang menjalankan kebijakan dan politik luar negeri tersebut. Berangkat dari batasan tersebut, maka kita perlu menyepakati bahwa Polri adalah salah satu aktor regional dan internasional. Keikutsertaan Polri dalam forum kerjasama kepala-kepala kepolisian ASEAN, Polri dengan Australian Federal Police dan beberapa negara kawasan dalam penanggulangan kejahatan transnasional, Polri dengan UNODC dalam pemberantasan kejahatan transnasional dan narkoba, Polri dengan Interpol serta Polri dengan United Nations Department of Peacekeeping Operation (UNDPKO).

Kesemuanya itu memberikan bukti kuat bahwa Polri tidak disangkal lagi adalah aktor regional dan internasional yang menjalankan mandat misi nasional di kancah internasional (baca misi internasional). Yang menjadi pertanyaan atau kegelisahan bersama adalah siapa yang mendapatkan mandat sebagai koordinator penyelenggara atau pelaksana misi internasional tersebut, siapa yang diberikan kewenangan untuk mewujudkan mandat itu ke dalam bagian renstra Polri dan menggerakkan berbagai unit kerja lain menuju visi nasional "Global Player".

Keterlibatan dan keikutsertaan Polri



dalam berbagai misi internasional Polri telah mencatat ribuan personil Polri dalam sejarah Polri moderen. Kesemuanya tergelar sejak misi pemeliharaan perdamaian PBB di Namibia (UNTAG tahun 1989) sampai dengan misi MINUSTAH di Haiti (2010). Kesemuanya itu adalah catatan tinta emas yang digoreskan para bhayangkara-bhayangkara negara. Itu tidak datang dengan sendirinya atau tiba-tiba, namun melalui proses panjang, berliku dan disertai dengan komitmen serta dedikasi yang kuat.

United Nations Police Adviser Ann Marie sebagai salah satu pejabat strategis UNDPKO memberikan apresiasi dan penghargaannya terhadap unjuk kerja dan kinerja peacekeepers Polri, seraya mengharapkan lebih banyak lagi kontribusi Polri dan Polwan dalam berbagai mission area yang tergelar. Penegasan beliau untuk meminta pemerintah Indonesia mengirinkan Polwan Indonesia mengindikasikan suatu peluang strategis multi benefit bagi Polri dan Polwan dalam dekade-dekade yang akan datang. Secara sederhana peluang itu akan menjadi bagian dari rencana pembangunan Polri merealisasi renstra ketiga *Strive for excellence 2025*.

KONTROVERSI POLRI

Pada dua tahun terakhir Polri dihadapkan pada isu citra dan reputasi yang "kontroversial" atau saling bersisian. Disatu sisi banyak pengakuan, apresiasi dan ucapan terima kasih dari berbagai pemangku kepentingan atas keberhasilan upaya pengungkapan

kelompok terorisme dan menegakkan hukum terhadap para pelakunya. Pada ranah misi internasional Polri pun mendapatkan hal yang sama dari berbagai pemangku kepentingan di daerah operasi (mission area) misi pemeliharaan perdamaian PBB, bahkan para petinggi PBB di New York pun mengungkapkan hal yang sama.

Sepatutnya kita menyukuri, kebanggaan atas kontribusi Polri dan menjadi bagian integral peran dan komitmen Polri terhadap visi pemerintah Indonesia dalam ikut serta mewujudkan dunia yang aman, adil dan sejahtera. Dalam konteks penanggulangan kejahatan transnasional Polri juga telah menjadi salah satu rujukan lembaga-lembaga kepolisian dan penegakan hukum kawasan lain dalam pengembangan kebijakan dan strategi.

Dalam sesi diskusi, pada paruh pertama Agustus 2010 di Sespim Polri, terungkap pertanyaan atau lebih tepat lagi argumentasi dari salah seorang peserta, yang intinya tidak sependapat dengan visi presiden SBY yang menginginkan Indonesia sebagai Global Player, utamanya dalam konteks misi internasional pemeliharaan perdamaian. Argumentasinya bahwa visi itu tidak realistis, berlebihan dan tidak membumi, karena Indonesia masih perlu fokus pada masalah-masalah domestik saja.

Mungkin ada benarnya argumentasi atau pandangan pesimis rekan kita itu, namun kita juga perlu memahami secara jernih makna suatu visi. Apalagi visi tersebut dicanangkan oleh seorang

presiden dengan penduduk nomor 4 terbanyak di dunia dan terbanyak di antara negara-negara berkembang di luar China dan India. Dalam tataran kebijakan dan kepentingan politik luar negeri Indonesia, maka Polri merupakan salah satu komponen strategis dalam sistem "multi track diplomacy" Indonesia. Visi Global Player Indonesia dalam tataran filosofis perlu dibaca sebagai bagian dari implementasi alinea keempat pembukaan undang-undang dasar 1945 ".....ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Sementara dalam konteks operasional merupakan pengejawantahan dari pasal 41 undang-undang nomor 2 tahun 2002.

Secara umum berbagai isu global dapat dikerucutkan dalam empat kelompok besar, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan (termasuk penegakan hukum di dalamnya). Berbagai lembaga atau kerja sama bilateral dan multilateral menjadikan keempat itu sebagai agenda bahasan mendasar dan kadang kala menjadikannya sebagai agenda khusus di dalam suatu situasi yang dinyatakan emerjensi atau krisis. Contoh faktual dan aktual adalah bencana alam banjir yang melanda kawasan Pakistan belum beberapa lama berselang. Karena dampaknya masif, luar biasa dan luas kerusakan serta kehancurannya.

Banjir ini menyebabkan 1600 korban manusia tewas dan 17 juta pengungsi serta kerugian material yang luar biasa. Dengan pertimbangan daru-

rat kemanusiaan, maka PBB segera menggelar sidang khusus untuk segera memberikan bantuan kemanusiaan dan menghimbau negara-negara anggota PBB untuk memberikan bantuannya. Banjir bandang ini adalah salah satu isu yang terkait dengan anomali iklim global dan perilaku manusia yang rakus dalam mengeksploitasi alam. Terlihat adanya korelasi antara politik global tentang keseimbangan dan pelestarian alam, kepentingan ekonomi, penegakan hukum dan keamanan manusia atau masyarakat yang menjadi pelaku dari aspek-aspek yang disebutkan sebelumnya. Kesemua aspek atau isu global tersebut dapat menjadi faktor pemicu utama atau setidaknya pemicu perantara terjadinya berbagai konflik di dalam negeri ataupun antar negara. Konflik di Afghanistan berlangsung bukan hanya periode pasca kekalahan Uni Soviet oleh milisi Taliban di akhir dekade 80-an, namun telah berlangsung beberapa dekade sebelumnya, bahkan dapat dikatakan sejak beberapa abad sebelumnya ketika Afghanistan masih berupa kekaisaran.

Konflik tersebut tidak lain adalah konflik kepentingan geopolitik di antara berbagai aktor global. Dengan kata lain adalah nafsu untuk mendominasi atau membuktikan superioritas pengaruh politik negara-negara adi daya di berbagai kawasan dunia lainnya. Berbagai masalah yang terjadi sebagian besar bermula pada keamanan dan keselamatan manusia, dalam konteks itulah PBB dan berbagai organisasi regional menggelar berbagai misi kemanusiaan atau perdamaian / keamanan. Indonesia tentu saja akan menjadi bagian dari konsep PBB ataupun organisasi kawasan dalam mendukung berbagai operasi tersebut.

Manfaat Strategis

Partisipasi dan kontribusi Polri dalam berbagai misi internasional perlu dibaca sebagai suatu peluang strategis yang multi benefit, yang memberikan nilai positif dan konstruktif bagi Polri sebagai lembaga kepolisian dan juga bagi para personil yang terlibat langsung ataupun tidak langsung mendukung misi internasional tersebut, antara lain pertama, keikutsertaan personil Polri sejak tahapan pelatihan di Indonesia sampai dengan penguasaan di daerah operasi akan sangat sarat diwarnai oleh prinsip-prinsip dan standar pemolisian demokratis. Pencerahan akan terjadi sekembali-

nya anggota Polri ke Indonesia dan mereka akan menjadi agent of change bagi internalisasi dan intitusinalisasi nilai-nilai tersebut kedalam lingkungan sosial dan kerja di tanah air.

Kedua, terkait dengan Industri strategis pertahanan dan kepolisian yang (sedang) dikembangkan di Indonesia (BUMNIS), maka berbagai perlengkapan dan peralatan yang dipakai dalam misi internasional dapat dikembangkan dan diadakan oleh industri dalam negeri. Hal ini memberi peluang bagi industri dalam negeri untuk pengembangan berbagai rekayasa atau rancang bangun perlengkapan dan peralatan tersebut, antara lain APC, water canon, truk / bus pengangkut penumpang, kendaraan patroli taktis, senjata api, jaket dan helm pelindung anti peluru dsb.. Sektor ini akan banyak menyerap tenaga kerja Indonesia dan sumber daya nasional, yang akan mendorong pengembangan sektor industri dan ekonomi dalam negeri serta peningkatan kesejahteraan nasional. Indonesia tentu saja akan menghemat devisa nasional dan sebaliknya devisa tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan sektor lainnya.

Ketiga, ruang dan peluang penguasaan dalam misi-misi internasional akan membuka dan membuat akses jejaring nasional sampai dengan internasional yang memiliki nilai manfaat strategis bagi pengembangan kerja sama individual bagi sesama anggota kepolisian atau antara anggota Polri dengan berbagai organisasi mitra kerjanya. Pemanfaatan jejaring ini akan semakin memperluas cakrawala pandang dan pemahaman tentang ber-

bagai dinamika sosial dan pemolisian universal, yang kelak tentu saja akan sangat bermanfaat bagi kepentingan Polri dan nasional Indonesia.

Keempat, budaya kepolisian secara umum bersifat universal, ini dimungkinkan karena pendidikan dan pelatihan serta tugas dan kewenangan yang dimandatkan membentuk sikap dan perilaku anggota yang relatif hampir sama. Dengan demikian interaksi dan komunikasi didalam konteks misi-misi internasional akan memberikan kesempatan bagi anggota Polri untuk dapat menemu-kenali, menyerap dan mengadopsi berbagai nilai-nilai universal yang positif bagi pengembangan kultur Polri di tanah air. Pengayaan nilai-nilai universal terhadap nilai-nilai lokal (culture set) akan menjadikan kultur Polri yang lebih diterima dan akan menjadikan Polri sebagai lembaga penegakan hukum yang dimiliki dan dicintai oleh bangsa serta masyarakat Indonesia.

Kelima, bukanlah hal yang asing berkembangnya berbagai sindikat dan kejahatan transnasional saat konflik atas pasca konflik terjadi. Penyelundupan senjata, bahan makanan pokok, narkoba, uang palsu sampai dengan perdagangan perempuan dan anak-anak menjadi komoditas para sindikat kejahatan tersebut. Praktek-praktek dan modus operandi sindikat tersebut akan memberikan wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi pengembangan kebijakan dan strategi penyidikan kejahatan transnasional di Indonesia.

Keenam, situasi lain yang berkembang saat itu adalah lumpuhnya sistem





pemerintahan, ketidak-tersedianya sarana dan prasarana pelayanan publik, ketiadaan kepastian hukum, rasa aman masyarakat, perebutan sumber-sumber kekuasaan (politik, ekonomi, keamanan dan penegakan hukum). Kesemuanya ini bersumber dari inter dan intra conflict, yang mengharuskan langkah-langkah segera dalam resolusi konflik. Resolusi yang dimandatkan oleh Dewan Keamanan PBB dapat membuka wawasan yang lebih jernih, terbuka dan komprehensif (mind set) bagi anggota Polri yang ikut dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB.

Konsep ini tentu saja diharapkan dapat merubah paradigma anggota Polri dan membawanya ke dalam cara pandang dan pendekatan terhadap konflik yang terjadi di tanah air dan

resolusi konflik yang dapat diterima serta diaplikasikan oleh semua pihak. Ketujuh, di dalam berbagai penggelaran misi pemeliharaan perdamaian PBB selalu diberlakukan manual (sejenis kumpulan informasi yang bersifat teknis terkait dengan tugas dan peran personil PBB) dan prosedur tetap terkait dengan situasi-situasi tertentu.

Misi perdamaian PBB selalu dihadapkan pada berbagai dinamika situasi dan tingkatan keamanan atau kemanusiaan yang berjenjang / eskalatif. Pada situasi darurat dan krisis, maka manajemen krisis akan dinyatakan berlaku. Konsekuensinya adalah diberlakukannya pembatasan mobilitas personil PBB, peningkatan prosedur keamanan sampai dengan relokasi atau evakuasi personil ke daerah aman.

Pemahaman dan pengalaman di dalam situasi krisis tersebut akan membentuk pemahaman tentang hakekat dan arti penting K3I (Komando, Koordinasi, Kendali dan Informasi) serta keterlibatan dan peran berbagai aktor terkait dalam pengambilan keputusan di tingkatan strategis, taktis dan teknis. Cara berpikir, bertindak dan bekerja sama secara komprehensif, integral dan holistik diharapkan dapat diadopsi, dikembangkan dan diaplikasikan kedalam situasi yang (relatif) sama di Indonesia.

Kedelapan, dinamika misi pemeliharaan perdamaian PBB yang disertai dengan berbagai perubahan kebijakan, doktrin, regulasi dan mandat Dewan Keamanan PBB, perlu dipandang sebagai suatu peluang untuk pengembangan doktrin dan kurikulum pada pendidikan dan pelatihan kepolisian. Peluang ini diharapkan akan semakin mendorong momentum reformasi Polri yang sejalan dengan prinsip dan standar pemolisian demokratis. Kesembilan, dalam tataran kebijakan dan politik luar negeri Indonesia, maka peran serta, partisipasi dan kontribusi Polri (bersama dengan komponen TNI dan sipil) dapat memperkuat bargaining position and power Indonesia dalam merumuskan dan memutuskan berbagai resolusi yang berpihak kepada kepentingan nasional Indonesia, ASEAN dan negara sedang berkembang yang mana Indonesia menjadi salah satu soko guru kemajuannya.

Dalam konteks isu restrukturisasi Dewan Keamanan PBB (yang saat ini masih dikuasai oleh 5 negara pemenang perang dunia II), maka intensitas dan ekstensitas Indonesia dalam berbagai misi perdamaian PBB akan menempatkan Indonesia sebagai Troops Contributing Country (TCC) dan Police Contributing Country (PCC) yang aktif, konsisten dan signifikan dalam artian jumlah personil dan penempatannya pada berbagai misson area PBB. Capaian ini diharapkan juga memperkuat bargaining position and power Indonesia sebagai negara demokratis dan berkembang dengan demografis terbesar keempat. Tambahan lagi dalam konteks Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia adalah negara Islam demokrat terbesar didunia, sehingga kedudukannya menjadi sangat strategis dan signifikan dalam dinamika politik Islam dunia.

Kesepuluh, tanpa menafikan realitas APBN bahwa pemerintah belum

mampu memberikan kesejahteraan bagi anggota Polri, maka keikutsertaan anggota Polri dalam misi-misi internasional merupakan kesempatan untuk mendapatkan "income non APBN", dalam konteks yang lebih luas peluang ini diharapkan sebagai pendulum yang seimbang dalam meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa, masyarakat dan Polri.

Terakhir, sebagaimana dimaklumi bahwa dekade terakhir telah menempatkan media massa sebagai kekuatan keempat di dalam kehidupan berne-gara, berbangsa dan bermasyarakat di berbagai belahan dunia. Kekuatan dan pengaruh informasi telah mampu merubah opini, persepsi dan asumsi berbagai pihak. Pencitraan seseorang atau suatu lembaga (dapat) diubah oleh informasi yang dimanipulasi oleh kekuatan keempat tersebut.

Ada nilai positif dan sisi negatif fenomena media massa kontemporer ini. Kesadaran akan arti penting dan strategis potensi kekuatan tersebut, perlu dimanfaatkan untuk membangun citra Polri yang lebih demokratis, humanis, profesional dan moderen. Intensitas dan ekstensitas peran, partisipasi dan kontribusi Polri yang signifikan dalam berbagai misi internasional diharapkan akan memberikan nuansa yang berbeda tentang keberadaan Polri dan merubah persepsi negatif masyarakat Indonesia tentang Polri serta mendongkrak citra Polri yang lebih demokratis, humanis dan protagonis.

Langkah Besar Menuju Global Player

Sebagai manusia kita diberikan hak, peluang dan kesempatan untuk berobsesi, bervisi atau bercita-cita besar kedepan. Itu sangat manusiawi dan lumrah di tengah kehidupan yang serba kompetitif dan komplikatif, namun demikian mimpi tidak akan mungkin terwujudkan kalau kita tidak pernah mau memulai dan mencoba untuk mewujudkannya. Membangun Polri sebagai salah satu pemain global dalam misi internasional ibarat kita sedang membangun rumah dengan rancang bangun yang harus memenuhi berbagai kriteria yang sejalan dengan fungsi dan peran serta keberadaan bangunan di tengah bangunan dan lingkungan geografis serta sosial yang ada.

Kita tidak boleh setengah hati atau ragu atau bahkan bersikap sinis, apriori atau pesimis terhadap langkah



besar itu. Oleh karenanya, Kapolri BHD berani menggapai mimpi itu dengan pencaangan pembangunan Aseanapol Peacekeeping Training Center (APTC) di Cikeas, Bogor. Strategi ini ditindaklanjuti dengan roadmap-nya pada saat ASEANAPOL 2010 di Phnom Penh Kamboja yang lalu. Dalam waktu relatif singkat Kapolri pun telah mempromosikan visi ini dihadapan presiden SBY dalam kunjungannya ke Cikeas 6 juli 2010 yang lalu. Mimpi ini pun sudah dijual ke hadapan para petinggi di markas besar PBB di New York, dengan pertimbangan dan harapan adanya dukungan komitmen UNDPKO untuk mendukung dan bersinergi dengan langkah besar ini. Harapan itu terjawab dengan rencana kunjungan UN Police Adviser ke Indonesia. Suatu peluang yang sangat strategis dan monumental dalam berbagi best practices dan komitmen serta meng- global kan Polri ke depan petinggi PBB.

Di tahun 2010 ini restrukturisasi Polri telah disetujui dan membuka ruang dibentuknya Divisi Hubungan Internasional. Unit kerja yang memiliki dua soko guru, NCB Interpol dan Pusat Misi Internasional Polri. Lembaga bentukan baru ini diharapkan akan menjadi the main key actor dalam menyelenggarakan berbagai misi Polri di dunia internasional. Sangat diharapkan kehadiran kebijakan Mabes Polri yang mempersyaratkan bahasa Inggris sebagai bahasa ofisial di kalangan Polri saat-saat jam kerja, yang nantinya akan menjadi kemampuan habitual bagi anggota Polri dalam menyongsong tugas dan perannya di dunia interna-

sional.

Menyadari bahwa pemahaman tentang hubungan dan kerja sama internasional adalah sangat mendasar dan signifikan bagi anggota Polri, maka berbagai lembaga pendidikan pembentukan dan pengembangan umum pun sudah harus mencantumkan hubungan dan kerja sama internasional sebagai salah satu subyek kurikulumnya. Dengan demikian sejak dini anggota Polri sudah dibekali dengan wawasan pengetahuan tentang subyek tersebut, sehingga ke depan kita mampu menyiapkan data base yang penuh terisi nama-nama personel Polri dengan berbagai keunggulan kompetitifnya.

Menyikapi sedikitnya jumlah kontribusi Polri sejak tahun 1989 sampai dengan misi Haiti, maka terasa ada yang janggal dengan kontribusi Polri dibandingkan dengan jumlah Polri se Indonesia, dengan kata lain rasio dan persentase keikutsertaan Polri sangat kecil sekali. Pada sisi lain terdapat mekanisme dan semacam penilaian di kalangan UNDPKO untuk menawarkan partisipasi negara-negara anggota PBB dengan melihat pada United Nations Standby Arrangement System (UNSAS). Indonesia belum pernah terdaftar di sana, apalagi berbicara pada level kesiapan Polri.

Dalam mekanisme deployment UNDPKO, terdapat empat katagori level standby force di UNDPKO (level 1 sampai dengan 4), dengan level 4 sebagai daftar status kesiapan standby force, itu berarti satu kontingen kepolisian suatu negara dalam waktu relatif singkat dapat segera di tempatkan diberbagai mission area. Menyadari

arti penting dan mendasar status standby force, maka pembangunan standby force Polri adalah pilihan yang bersifat "keharusan".

Pembangunan dapat dilakukan dengan pendekatan bottom up melalui pembentukan rayonisasi standby force Polri, yang mana beberapa Polda berdekatan dikelompokkan ke dalam satu rayon. Rayon ini akan dijadikan center for excellence, yang diberikan kewenangan manajerial strategis untuk menyelenggarakan proses rekrutmen, seleksi sampai dengan pelatihan bagi anggota Polri calon standby force nasional. Data dinamis ini (standby force list) akan di-update-kan pada database Mabes Polri dan dikirimkan secara reguler ke UNSAS di New York, sehingga PTRI New York memiliki posisi dan kekuatan tawar yang logis untuk menegosiasikan kepentingan Indonesia, cq Polri.

Isu kesetaraan jender adalah isu global yang merambah hampir ke berbagai organisasi kawasan atau antar kawasan. Beberapa pejabat strategis PBB kerap meminta atau mendorong Indonesia untuk lebih membuka kesempatan kepada Polwan untuk berpartisipasi dalam berbagai misi perdamaian PBB. Tidak saja pada misi-misi yang bersifat individual sebagai police adviser, namun juga tergabung dalam unit taktis seperti formed police unit.

India adalah negara pertama yang menugaskan 1 FPU (140 personil taktis dan pendukung) pada misi perdamaian PBB. Bahkan Bangladesh dan Nepal sebagai negara berkembang di kawasan Asia Selatan telah mencatatkan jumlah personil kepolisian yang lebih signifikan dibandingkan dengan Indonesia. Dinamika politik kawasan tersebut patus mendorong Mabes Polri menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan standby force Polwan, sehingga di tahun 2011 Polri dapat menempatkan Polwan dalam jumlah yang lebih signifikan dan menjalankan peran strategis bagi suksesnya misi perdamaian Indonesia.

Kultur primordial bukanlah hal yang selalu negatif atau ditabukan, hanya perlu ditempatkan secara obyektif, jernih, komprehensif dan berorien-



FOTO: EVA/JAGRATARA

tasi kepada kepentingan perdamaian dan kemanusiaan. Dalam konteks dan pemahaman itu, ada baiknya Mabes Polri mengintensifkan komunikasi dan diplomasi dengan Pejambon dan PTRI New York. Upaya ini dimaksudkan untuk meminta dukungan dan akses negosiasi antara Polri dengan UNDPKO guna menempatkan perwira polri di UNDPKO. Penempatan ini akan bermakna strategis bagi berbagai pencapaian strategi Trunojoyo untuk menggandakan partisipasi dan kontribusi Polri dalam berbagai misi perdamaian PBB. Sementara ini satu pamen Polri sedang berproses fit and proper test dengan UNDPKO, suatu langkah yang harus didukung all out untuk menjadikan dia perwira Polri pertama yang menjalankan misi besar di UNDPKO.

Dekade terakhir keberadaan dan peran media banyak diakui sebagai kekuatan keempat, yang liputannya secara potensial dapat berimplikasi terhadap persepsi, pemahaman dan kesadaran masyarakat luas, sehingga mendorong berbagai opini yang beragam. Pengalaman empiris itu menunjukkan bahwa media merupakan kekuatan efektif untuk membangun atau memperkuat citra positif Polri dihadapan para pemangku kepentingan lokal nasional, regional bahkan global. Menyadari arti penting dan strategis keberadaan dan peran media tersebut,

maka Mabes Polri (baca divisi humas) perlu menjadi aktor langsung dalam mendukung strategi semesta Polri untuk menjadikan Polri sebagai Global Player.

Kapolri baru TP dalam fit and proper test didepan komisi III DPR mencanangkan 10 program prioritas 100 hari. Tentu saja program ini lebih bernuansa strategis untuk penanggulangan berbagai masalah kamtibmas internal atau domestik Indonesia. Agak luput Mabes Polri mencanangkan pembangunan kapasitas dan kapabilitas peacekeeping force Polri, padahal momentum itu akan sangat strategis membangun reputasi dan citra Polri dalam konteks misi-misi internasional Polri. Idealnya, memang Kapolri baru dapat ikut menjadi bagian perahu besar dalam mewujudkan visi presiden SBY "Global Player". Setidaknya di akhir kepemimpinan beliau, Mabes Polri mampu merumuskan grand strategy Polri menuju pembangunan peacekeepers Polri yang mampu berpartisipasi dan berperan secara optimal, efektif dan profesional di dalam menjawab mandat resolusi Dewan Keamanan PBB. Semoga. *** (Boy Salamuddin, berpangkat Irjen, adalah Direktur Eksekutif JCLEC - AKPOL Semarang, Jawa Tengah)

Jakarta, Oktober 2010

DIREKTORAT POLISI PERAIRAN POLDA JATIM

BESERTA SELURUH JAJARAN DAN BHAYANGKARI

M E N G U C A P K A N



Dirgahayu POL AIRUD Ke-60

1 DESEMBER 1950 - 1 DESEMBER 2010

"Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Siap Meningkatkan Kinerja yang Profesional, Bermoral, Modern dan Solid Melalui Program Revitalisasi Polri Menuju Pelayanan Prima, Guna Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat"



DIRPOLAIR POLDA JATIM
KOMBES POL DRS. ANANG SYARIF HIDAYAT



Raja-Raja Kecil di daerah



PASANGAN Bung Karno dan Bung Hatta yang pernah menjadi pemimpin bangsa Indonesia pada awal-awal tahun setelah Bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan, diyakini sebagai pasangan yang ideal. Keduanya dianggap klop sebagai duet yang diharapkan mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Namun sayang, di tengah perjalanan memimpin, Bung Hatta mundur dari jabatannya selaku Wakil Presiden karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan Bung Karno.

TOH sebagai anak bangsa keduanya tetap bersahabat, mengabaikan perbedaan prinsip. Saat Bung Karno terbaring lunglai di rumah sakit, Bung Hatta datang menengok, memberikan perhatiannya. Ketika ada pihak-pihak yang bermaksud membelokkan opini bahwa Bung Karno bukan tokoh penggali Pancasila

yang sebenarnya, Bung Hatta tampil membelanya.

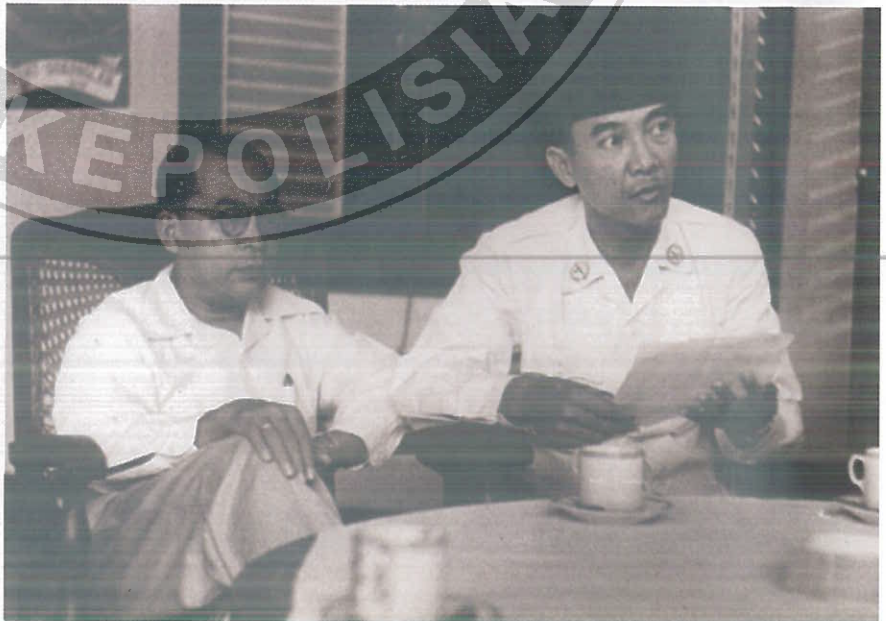
Kisah ini diceritakan oleh politisi senior Sabam Sirait kepada Jagratara, di Jakarta, Sabtu (6/11). Persahabatan Bung Karno dan Bung Hatta, katanya, perlu diteladani para politisi dan para pemimpin negara saat ini. "Walau secara politik dan prinsip mereka berseberangan, dalam pergaulan sehari-hari mereka tetap bersahabat, itu yang mesti dicontoh," tandasnya.

Lantas, apa sebenarnya pokok persoalan dari perbedaan dua negarawan tersebut? Bung Karno, jelas Sabam, berpendapat kalau keadaan negara sudah tertata, maka Presiden, DPR/DPD, Gubernur, Bupati, dan Walikota harus dipilih langsung oleh rakyat. Alasan itu, karena negara Indonesia berbentuk Republik, bukan Kerajaan.

Namun pendapat itu ditentang oleh Bung Hatta yang berpendapat bahwa sekalipun Indonesia adalah Negara berbentuk republik, hanya presiden

dan anggota DPR/DPD yang dipilih langsung oleh rakyat. Sedangkan untuk Gubernur, Bupati, dan Walikota ditunjuk langsung oleh Presiden. "Kalau Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih langsung oleh rakyat, Bung Hatta khawatir nantinya akan muncul raja-raja kecil di daerah," kutip Sabam.

Apa yang dikhawatirkan oleh Bung Hatta, bahwa akan muncul "raja-raja kecil" di daerah sebagai akibat dari model pemilihan yang diterapkan Bung Karno, memang menjadi kenyataan. Selain pemilihannya menghabiskan biaya yang sangat tinggi, juga sering diwarnai kekacauan dan kerusuhan dalam proses pemilihannya. Dan yang memprihatinkan, kualitas mereka pun terkadang jauh dari harapan masyarakat. "Saya kira sudah waktunya system itu ditinjau kembali atau kalau perlu dilakukan revisi dan mempertimbangkan kembali pemikiran Bung Hatta," tukas Sabam mengakhiri obrolan. [Sond]



Tak Takut Di-Recall



BERNAUNG dalam partai koalisi pemerintah, tidak harus membuatnya diam, tapi justru sebaliknya. Suaranya lantang dan keras, khususnya dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakilinya. Meski pernyataannya serngkali tidak seirama alias berseberangan dengan pemerintah tidak membuatnya takut bakal berdampak pada keanggotaannya di DPR. Siapa lagi kalau bukan H Bambang Soesatyo, salah seorang anggota DPR asal partai Golkar, dengan jabatan Wakil Bendahara Umum DPP Golkar, 2009 2015.

"Ini hanya soal waktu saja tapi pasti," tandas tokoh yang juga dikenal sebagai penulis buku ini. Buku berjudul "Skandal Gila Bank Century 2010" merupakan karya terbaru yang ditulis menyusul bergulirnya perseteruan antara KPK dan Polri yang merembet ke kasus Bank Century. Sejak itu nama Bambang Soesatyo kerap muncul ke permukaan publik melalui sejumlah media. Pernyataannya yang tegas semakin menunjukkan bahwa Bambang adalah sosok wakil rakyat yang kritis.

Komentarnya tentang pemberantasan korupsi yang melibatkan tokoh mafia pajak Gayus Tambunan, ayah tiga anak ini berujar bahwa pemberantasan korupsi hanya manis di mulut dan untuk pencitraan saja, tapi 'membre' di pelaksanaan. Untuk itulah Bambang yang menikah dengan Lenny Sri Mulyani ini mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas siapa sesungguhnya tokoh dibalik Gayus. "Ini ujian bagi Timur Pradopo, apakah Ia benar-benar Kapolri rakyat," tandasnya. [sond]

"PARTAI itu kan harus menyuarakan aspirasi masyarakat, bukan menyuarakan aspirasi penguasa. Apalagi partai Golkar. Partai Golkar itu suara rakyat. Dengan demikian saya berkeyakinan selama saya menyuarakan aspirasi rakyat, tidak mungkin saya di-recall," tukas alumni Universitas Jayabaya Jakarta tersebut, menjawab Jagratara, di Jakarta, Sabtu (13/11).

Anggota DPR yang duduk di Komisi III tersebut justru menegaskan kalau Partai Golkar sudah mulai mengatur-atur anggotanya dan melarangnya menyuarakan aspirasi rakyat, maka sebaiknya Golkar mengubah slogannya dulu. "Slogannya bukan lagi suara Golkar suara rakyat, tapi suara Golkar suara penguasa," cetus kelahiran Jakarta, 10 September 1962 ini seraya tertawa.

Penerima penghargaan "Top Eksekutif Indonesia, 1996" dan "PWI News Maker Award 2010" ini menanamkan satu prinsip pada dirinya dan berharap juga diikuti oleh rekannya sesama anggota DPR. Bahwa kalau partai tidak menyuarakan aspirasi rakyat, dan memilih menyuarakan aspirasinya pada penguasa bakal ditinggalkan oleh masyarakat dan itu artinya tidak memperoleh dukungan.



CARA SINDIKAT NARKOBA MEREKRUT GENERASI BARU



OLEH : DRS. SISWANDI

Hari masih pagi saat telepon selular Dani (nama samaran) berdering. Matanya masih enggan terbuka walau cahaya matahari sudah memancar berpendar disela-sela tirai yang menutupi kamarnya. Panggilan pertama dia abaikan karena masih enggan berpisah dengan mimpi. Tetapi panggilan kedua sudah membuatnya gagal untuk kembali nyenyak. Diraihnya telepon keluaran terbaru itu. Dilayar tampil sederet nomor telepon yang tidak dia kenal. Dahinya berkerut dan mencoba mereka-reka. Tak tampak juga dimemori otaknya.

TELEPON berasal dari seorang perempuan. Agaknya telepon dari lawan jenis membuat pria berusia 25 tahun ini bersemangat. Sayang ternyata telepon itu bukan untuknya. "Bisa bicara dengan Mr. Roy (sebutlah demikian)", ujar suara perempuan itu diseberang telepon. "Insiden salah sambung" ini tak membuat komunikasi mereka terputus. Bahkan mereka berjanji untuk melanjutkan pertemuan tatap muka. Waktu dan tempat ditentukan kemudian. Belakangan dia menyesali kesepakatan ini. Kesepakatan yang membawa dia berurusan dengan aparat kepolisian untuk kasus narkoba.

Dani sebenarnya belum pernah berurusan dengan narkoba atau sejenisnya. Dia hanya berteman dengan pengguna lintingan ganja saat SMA. Dia sendiri tak pernah tertarik untuk mencoba. Semenjak lulus sekolah menengah atas, Dani sempat kuliah untuk beberapa waktu. Tetapi masalah ekonomi membuat dia harus meninggalkan buku dan teman-temannya di sebuah perguruan tinggi di Jakarta. Sejak saat itu dia merintis usaha modal kecil dengan beberapa teman.

Walau kecil cukup untuk menutupi biaya hidupnya sebagai bujangan.

Beberapa kali Sari menghubungi Dani minggu setelah telepon salah sambung itu. Pada suatu hari mereka sepakat untuk bertemu di sebuah pertokoan di selatan Jakarta. Dalam pertemuan itu Dani agaknya sedikit canggung. Maklum ini adalah pertemuan pertamanya dengan seorang perempuan yang ditaksirnya berusia 30 tahun. Berkulit putih, tinggi semampai, dengan rambut sebahu. Dimata Dani perempuan ini terbilang cantik. Bila Dani agak kikuk, tidak demikian dengan Sari yang tampak riang dan seolah dia sedang bertemu teman lama. Sari pandai mencairkan suasana.

Percakapan diantara mereka segera mengalir lancar. Dani sudah melupakan kikuknya. Kepada Dani, Sari mengaku bekerja sebagai Public Relation disebuah perusahaan garmen. Karena itu dia kerap bepergian keluar negeri untuk bertemu dengan relasi atau sekedar menjajaki kerjasama dengan rekanan di luar negeri. Dani hanya menyimak dan sesekali bertanya. Sepertinya di terkesima dengan sosok dihadapannya.

Tahu Dani tak memiliki pekerjaan

